

## ABSTRAK

**Yosi Yuliasari** (1153050128) : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”

*Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerusakan hutan. Diatur dalam Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun dalam kenyataannya Jumlah tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan Pangandaran ada 8 kasus yang masuk ke Polres Ciamis selama 2015-2022. Asisten Perhutani (ASPER) Kabupaten Pangandaran menunjukkan data pengurangan jumlah tanaman yaitu pada tahun 2017 35,42 Ha, pada tahun 2018 35,10 Ha, dan pada tahun 2019 sebanyak 34,42 Ha. Berdasarkan inventarisasi, lahan kritis di kabupaten Pangandaran hingga kini diperkirakan lebih dari 3.549 hektar (Ha).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan Pasal 12 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hambatan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging*, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh Polres Ciamis.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan yang terbagi atas teori absolute/pembalasan, teori relatif/tujuan serta teori gabungan.

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif analisis*, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Serta pendekatan *juridis empiris* yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Ciamis adalah berupa penindakan (represif), dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan karena tidak terjangkaunya pengawasan karena luas wilayah, faktor masyarakat, minimnya sarana prasarana, proses penyitaan, serta proses lelang yang memerlukan waktu lama, upaya yang dapat dilakukan terhadap penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* yaitu dengan cara pelaksanaan pencegahan (Preventif) dan tindakan (Represif). Pelaksanaan Pencegahan (Preventif) yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat, melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, penanaman hutan secara intensif dan menyediakan beberapa kendaraan berupa motor trail untuk digunakan dalam patroli. Tindakan (Represif) yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan *Illegal Logging*.